

## RELEVANSI PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI

Aulia Nazwa Saskia<sup>1</sup>

aulianazwasaskia@gmail.com<sup>1</sup>

Muhammad Raihan Pasha<sup>2</sup>

pashanyadewi11@gmail.com<sup>2</sup>

Zaenul Slam<sup>3</sup>

zaenul\_slam@uinjkt.ac.id<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Jakarta Syarif Hidayatullah

### ABSTRACT

*Pancasila, as the Indonesian nation's philosophical system, is the foundation of values that inspire all aspects of national and state life. In the era of globalization marked by rapid technological advances, economic liberalization, and the influx of various cross-cultural values, Pancasila faces increasingly complex challenges. This research aims to examine the relevance of Pancasila as a philosophical system in responding to the dynamics of globalization and changes in social and cultural values in Indonesian society. Using a qualitative approach using library research methods, this research examines various scientific literature and policy documents related to Pancasila philosophy and the phenomenon of globalization. The analysis shows that Pancasila possesses philosophical flexibility that allows it to adapt to changing times without losing its identity and core values. As a philosophical system, Pancasila can serve as a critical and ethical guideline for filtering global influences to maintain alignment with the character and personality of the Indonesian nation. Therefore, strengthening and revitalizing Pancasila values through education, public policy, and social practices are crucial steps in strengthening the nation's ideological resilience. By making Pancasila the foundation for thinking and acting amidst the currents of globalization, Indonesia can remain advanced and open to change without losing its moral roots and national identity.*

**Keywords:** Pancasila, Philosophical System, Globalization, National Values, Ideological Resilience..

### ABSTRAK

Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia merupakan fondasi nilai yang menjiwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, liberalisasi ekonomi, dan masuknya berbagai nilai lintas budaya, keberadaan Pancasila menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana relevansi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam merespons dinamika globalisasi serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji berbagai literatur ilmiah dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan

filsafat Pancasila dan fenomena globalisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kelenturan filosofis yang memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri dan nilai dasarnya. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mampu menjadi pedoman kritis dan etis dalam menyaring pengaruh global agar tetap sejalan dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penguatan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, kebijakan publik, serta praktik kehidupan sosial menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan ideologis bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir dan bertindak di tengah arus globalisasi, Indonesia dapat tetap maju dan terbuka terhadap perubahan tanpa kehilangan akar moral dan identitas nasionalnya.

**Kata Kunci:** Pancasila, Sistem Filsafat, Globalisasi, Nilai Kebangsaan, Ketahanan Ideologis.

## **PENDAHULUAN**

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari kepribadian, nilai budaya, serta keyakinan religius masyarakatnya. Menurut Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, Pancasila tidak lahir dari pemikiran satu individu atau kelompok tertentu, melainkan tumbuh dari nilai-nilai luhur yang telah lama mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak masa lampau. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagaimana dijelaskan oleh Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh yang menuntun masyarakat Indonesia dalam memahami hakikat manusia, pengetahuan, dan nilai kehidupan. Oleh karena itu,

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi formal negara, tetapi juga sebagai panduan moral dan spiritual dalam bertindak dan bersikap di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan perkembangan zaman, arus globalisasi dan modernisasi membawa dampak besar terhadap tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Menurut Steger, M. (2013). *Globalization: A Very Short Introduction*. Oxford University Press globalisasi membuka akses luas terhadap informasi, kemajuan teknologi, serta hubungan internasional tanpa batas ruang dan waktu. Di satu sisi, hal ini menjadi peluang besar bagi kemajuan bangsa melalui kemudahan memperoleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan peluang ekonomi global. Namun di sisi lain, globalisasi juga memunculkan tantangan serius berupa krisis

moral, pergeseran nilai, dan semakin rapuhnya identitas nasional (Tilaar, H.A.R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo).

Fenomena tersebut terlihat jelas pada generasi muda, terutama kalangan mahasiswa, yang kerap lebih terpengaruh oleh budaya luar dibandingkan nilai-nilai luhur bangsanya sendiri. Menurut Yuwono, D. (2020). “Relevansi Pancasila bagi

Generasi Milenial.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, banyak mahasiswa mulai menganggap budaya asing sebagai tolok ukur kemajuan, sementara nilai-nilai Pancasila justru dianggap kuno dan tidak relevan dengan kehidupan modern. Gejala ini tampak dalam menurunnya rasa nasionalisme, berkurangnya semangat gotong royong, meningkatnya sikap

individualistis, serta melemahnya kepedulian sosial terhadap sesama. Dalam situasi seperti ini, Pancasila mulai kehilangan perannya sebagai pedoman hidup yang seharusnya menuntun perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila sejatinya berfungsi sebagai *philosophische grondslag* atau landasan filosofis bangsa Indonesia, sebagaimana ditegaskan Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, yang menuntun masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri.

Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan memiliki makna universal yang tetap relevan sepanjang masa. Dalam pandangan Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh, Pancasila berperan sebagai sistem nilai yang menyeimbangkan antara kemajuan material dan spiritual, kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta keterbukaan terhadap dunia global dan pelestarian identitas nasional.

Di era globalisasi yang penuh dengan kompetisi dan semangat individualisme, rasa nasionalisme bangsa Indonesia mulai mengalami pengikisan. Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh menyatakan bahwa modernisasi yang menonjolkan efisiensi, pragmatisme, dan gaya hidup konsumtif mengancam eksistensi budaya lokal dan menggerus semangat persatuan masyarakat. Pengaruh media sosial, misalnya, sering membuat generasi muda lebih fokus pada pencapaian pribadi dan popularitas dibandingkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, Pancasila perlu dihadirkan kembali secara nyata dalam ruang publik dan dunia pendidikan sebagai fondasi pembentukan karakter bangsa, agar generasi muda tidak kehilangan arah di tengah derasnya arus globalisasi.

Lebih jauh, pendidikan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Menurut Samani, M., & Hariyanto. (2012). *Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya proses pendidikan harus mampu menanamkan nilai Pancasila melalui pembelajaran yang reflektif, kontekstual, dan relevan dengan realitas kehidupan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami Pancasila sebagai teori, tetapi juga menghayati dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila yang berbasis nilai dan karakter perlu dikembangkan agar generasi muda tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral, etika, serta tanggung jawab sosial yang tinggi sebagai warga negara Indonesia.

Dengan demikian, penguatan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bukan sekadar keharusan moral, tetapi juga menjadi kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan bangsa. Menurut Samani, M., & Hariyanto. (2012). *Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya Pancasila harus berperan sebagai penyaring terhadap pengaruh negatif globalisasi, sekaligus sebagai kompas moral yang menuntun bangsa Indonesia memanfaatkan peluang global secara bijak. Relevansi Pancasila sebagai sistem filsafat akan tampak nyata apabila nilai-nilainya

benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan sosial, pendidikan, politik, dan ekonomi. Hanya dengan cara itulah Indonesia dapat menjadi bangsa yang modern, maju, dan terbuka terhadap perubahan, tanpa kehilangan akar budaya dan kepribadian nasionalnya sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat dalam menghadapi tantangan globalisasi. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka serta wawancara mendalam dengan para ahli filsafat, akademisi, dan praktisi kebijakan publik yang memiliki kompetensi di bidang ideologi dan kebangsaan.

Sumber data mencakup berbagai literatur ilmiah, seperti buku-buku referensi, jurnal akademik, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan filsafat Pancasila serta dinamika globalisasi. Proses analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Pendekatan ini digunakan untuk

memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki konsistensi, keandalan, serta mencerminkan objektivitas temuan penelitian. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana Pancasila tetap relevan sebagai sistem filsafat di tengah dinamika global yang terus berkembang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pancasila sebagai Benteng Identitas Nasional**

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga identitas nasional. Secara teoritis, fungsi Pancasila sebagai benteng identitas bangsa dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan, seperti teori identitas nasional, teori ideologi negara, dan teori nilai-nilai Pancasila yang berperan sebagai pedoman moral bangsa dalam menghadapi pengaruh globalisasi yang semakin kuat. Menurut Wibisono, Koento. *Kepribadian Nasional*. 1985, identitas nasional merupakan cerminan nilai budaya, sejarah, serta sistem sosial yang membentuk karakter khas suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi sumber utama identitas nasional karena mengandung nilai-nilai luhur yang telah tumbuh dalam budaya

bangsa. Nilai-nilai tersebut menjaga keutuhan dan karakter bangsa di tengah arus perubahan global.

Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. 2017. menegaskan bahwa ideologi adalah sistem nilai yang menjadi pedoman berpikir dan bertindak bagi suatu bangsa. Dalam hal ini, Pancasila memberikan arah moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan ini sejalan dengan Notonagoro. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. 1983 yang memandang Pancasila sebagai *ideologi terbuka*, yaitu sistem nilai yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap memiliki prinsip dasar yang tidak berubah. Dalam era globalisasi yang membawa ideologi asing seperti liberalisme dan kapitalisme, sifat keterbukaan Pancasila berfungsi menjadi filter: menerima nilai yang cocok, menolak yang merusak tatanan moral bangsa. Dengan demikian, Pancasila menjadi benteng ideologis yang menjaga jati diri Indonesia.

Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. 2011 menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki sifat universal sekaligus kontekstual. Nilai universal mencakup prinsip kemanusiaan yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia, sedangkan nilai kontekstual berakar pada budaya serta sejarah Indonesia. Nilai

Ketuhanan memberi dasar moral, Kemanusiaan menegaskan martabat manusia, Persatuan menumbuhkan semangat kebangsaan, Kerakyatan menekankan demokrasi beretika, dan Keadilan Sosial menjadi tujuan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai tersebut membentuk kesatuan sistem yang memperkuat identitas bangsa dalam menghadapi perubahan zaman..

Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. 2016 menyoroti bahwa globalisasi membawa tantangan serius terhadap identitas nasional melalui masuknya nilai-nilai asing yang bersifat materialistik dan individualistik. Jika tidak ada penguatan nilai dasar bangsa, identitas nasional dapat melemah. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai filter moral yang menjaga masyarakat tetap terbuka terhadap kemajuan global namun tetap berakar pada budaya bangsa. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman etis dalam memadukan modernitas dan nilai-nilai kepribadian bangsa.

Selain itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. *Laporan Kinerja BPIP*. 2020 menegaskan bahwa Pancasila memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa. Proses internalisasi nilai Pancasila perlu dilakukan

melalui pendidikan, kebijakan publik, serta praktik sosial agar menjadi nilai hidup dalam keseharian masyarakat. Pengamalan nilai-nilai Pancasila memperkuat identitas nasional dan memampukan bangsa menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka yang berakar pada nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya menjadi dasar identitas nasional, tetapi juga benteng ideologis dan moral yang melindungi bangsa dari pengaruh negatif globalisasi. Karena itu, penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi langkah fundamental untuk menjaga eksistensi bangsa di tengah dinamika global.

### **Pancasila Sebagai Penguatan Karakter Bangsa.**

Pancasila sebagai dasar filsafat dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk arah moral, etika, serta karakter nasional. Nilai-nilai dalam lima sila Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum dan politik negara, tetapi juga menjadi pedoman moral bagi seluruh warga negara. Menurut Notonagoro. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. 1983 Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan

aksiologis yang memandu bangsa dalam memahami hakikat manusia dan tujuan bernegara. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai yang membentuk karakter bangsa agar tetap berakar pada budaya nasional di tengah dinamika global.

Di era globalisasi dan modernisasi, karakter bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan. Arus informasi yang sangat cepat, kemajuan teknologi, serta derasnya pengaruh budaya asing mengubah cara pandang generasi muda. Menurut Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. 2016 globalisasi dapat memicu meningkatnya individualisme, melemahnya solidaritas, serta lunturnya kesadaran moral jika tidak diimbangi dengan nilai dasar bangsa. Fenomena seperti menurunnya gotong royong dan melemahnya rasa nasionalisme menjadi tanda berkurangnya penghayatan nilai Pancasila.

Pancasila memiliki peran strategis sebagai instrumen penguatan karakter bangsa. Setiap sila mengandung nilai universal yang membentuk manusia Indonesia yang religius, humanis, demokratis, dan berkeadilan. Menurut Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. 2017, nilai-nilai Pancasila dapat membentuk manusia yang utuh melalui penguatan spiritualitas,

kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Implementasi yang konsisten atas nilai tersebut akan menciptakan masyarakat yang beradab dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa.

Dalam dunia pendidikan, penguatan karakter berbasis Pancasila menjadi sangat penting. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk watak dan moral bangsa. Menurut Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. 2011 pendidikan merupakan ruang strategis untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila melalui pembiasaan, keteladanan, dan praktik sosial. Mahasiswa sebagai generasi penerus harus menjadi teladan dalam sikap religius, disiplin, toleran, dan cinta tanah air melalui aktivitas akademik maupun sosial.

Penguatan karakter bangsa melalui Pancasila juga menjadi benteng ideologis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Ketika budaya asing masuk tanpa batas, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. *Laporan Kinerja BPIP*. 2020 menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai filter moral dan ideologis agar bangsa tetap teguh pada jati dirinya. Nilai-nilai Pancasila membantu masyarakat bersikap selektif terhadap pengaruh global: menerima yang

positif dan menolak yang menggerus moral dan rasa kebangsaan.

Oleh karena itu, penguatan karakter bangsa melalui nilai Pancasila merupakan tanggung jawab kolektif, melibatkan negara, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan melalui pendidikan karakter, keteladanan, serta kebijakan publik yang menjunjung kemanusiaan dan keadilan. Menurut Kaelan. *Filsafat Pancasila*. 2018 revitalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan langkah utama untuk menjaga ketahanan moral bangsa di tengah tantangan zaman.

Pancasila akhirnya menjadi benteng moral dan ideologis yang menjaga integritas bangsa, serta menjadi kunci utama dalam membangun karakter bangsa yang beradab, mandiri, dan bermartabat di tengah arus globalisasi. Keselarasan antara nilai Pancasila dan kehidupan modern menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai ideologi negara sepanjang zaman.

### **Peran Pancasila dalam Mengatasi Radikalisme dan Intoleransi Global.**

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan arus informasi tanpa batas, tantangan terhadap stabilitas ideologi dan identitas nasional semakin kompleks. Salah satu ancaman nyata yang dihadapi dunia, termasuk Indonesia, adalah

munculnya paham radikalisme dan intoleransi. Menurut Azra, A. *Islam Nusantara dan Tantangan Radikalisme Global*. 2016, radikalisme global berkembang melalui jaringan transnasional yang memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk menyebarkan ide ekstrem. Kedua fenomena ini tidak hanya mengancam harmoni sosial, tetapi juga menggoyahkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan bersama. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki peran penting sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa untuk mencegah berkembangnya ekstremisme dan intoleransi.

Radikalisme dapat diartikan sebagai paham yang menginginkan perubahan ekstrem, bahkan melalui kekerasan. Menurut BNPT. *Laporan Indeks Potensi Radikalisme di Indonesia*. 2019 radikalisme tumbuh dari penafsiran sempit terhadap ajaran agama, rasa ketidakadilan, dan polarisasi sosial. Intoleransi, di sisi lain, adalah sikap menolak keberagaman dan tidak menghargai keyakinan atau budaya yang berbeda. Karena itu, dibutuhkan sebuah landasan ideologis yang mampu menumbuhkan semangat kebangsaan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam hal ini, Latif, Yudi. *Negara Paripurna*. 2011 menegaskan

bahwa Pancasila merupakan ideologi inklusif yang mampu merangkul keberagaman dan menjadi perekat persatuan bangsa.

Setiap sila dalam Pancasila secara substansial memuat nilai-nilai yang bertolak belakang dengan semangat radikalisme dan intoleransi.

- Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, menegaskan bahwa kehidupan beragama harus dijalankan dengan saling menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama, sehingga mencegah munculnya fanatisme dan diskriminasi.
- Sila kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, mengajarkan pentingnya menghormati martabat manusia serta menolak segala bentuk kekerasan dan penindasan.
- Sila ketiga, *Persatuan Indonesia*, menumbuhkan semangat kebangsaan yang menempatkan kepentingan bersama di atas perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan.
- Sila keempat, *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*, menekankan pentingnya menyelesaikan perbedaan melalui dialog, musyawarah, dan kebijaksanaan, bukan melalui paksaan

atau kekerasan.

- Sila kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, menegaskan pentingnya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sebagai upaya menghapus kesenjangan sosial yang sering menjadi akar lahirnya sikap ekstrem dan radikal.

Dalam konteks global, nilai-nilai Pancasila juga memiliki relevansi universal. Menurut Anwar, Dewi Fortuna. *Indonesia and Global Peace Diplomacy*. 2018. Indonesia dengan ideologi Pancasila berperan aktif dalam diplomasi internasional, menjadi pelopor perdamaian dunia, dan mendorong terwujudnya tatanan global yang lebih adil dan manusiawi. Nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi model ideologi alternatif bagi dunia yang saat ini tengah menghadapi krisis kemanusiaan dan konflik ideologis. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga dapat diintegrasikan dalam pendidikan kewarganegaraan global (global citizenship education), yakni pendidikan yang menumbuhkan kesadaran sebagai warga dunia yang menghargai perbedaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan berkomitmen terhadap perdamaian.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menangkal radikalisme dan

intoleransi dapat dilakukan melalui berbagai strategi nyata. Menurut BPIP. *Laporan Kinerja BPIP 2020* di bidang pendidikan, diperlukan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila di seluruh jenjang, agar peserta didik tidak hanya memahami nilai-nilai ideologi bangsa secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial. Seperti yang ditegaskan Kementerian Agama RI. *Panduan Moderasi Beragama*. 2021 pemerintah bersama lembaga keagamaan perlu memperkuat program moderasi beragama yaitu sikap beragama yang seimbang, menghargai perbedaan, dan menolak kekerasan atas nama keyakinan. Selain itu, media sosial sebagai ruang publik perlu dimanfaatkan secara positif untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi, persaudaraan, dan nasionalisme. Di sisi lain, keteladanan para pemimpin bangsa juga memiliki peran besar dalam menumbuhkan kembali budaya politik dan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai benteng ideologis dan moral bangsa dalam menghadapi ancaman radikalisme dan intoleransi global. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai dari Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, hingga Keadilan Sosial merupakan fondasi kuat bagi

terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, adil, dan beradab. Jika nilai-nilai tersebut terus dihayati dan diamalkan secara konsisten, Indonesia tidak hanya akan mampu menjaga keutuhan dan keharmonisan nasional, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan di tingkat global.

### **Pancasila sebagai Etika Politik di Era Modern.**

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dalam kehidupan sosial, tetapi juga sebagai sumber utama etika politik dalam sistem pemerintahan. Menurut Kaelan. (2016, 2017). *Pendidikan Pancasila* Etika politik yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila menekankan pentingnya moralitas, keadilan, dan kemanusiaan dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai kompas etis yang mengarahkan praktik politik agar senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil, menjunjung tinggi persatuan, serta dilandasi semangat musyawarah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi, keterbukaan informasi, dan kompetisi politik yang semakin intens,

praktik politik sering kali mengalami krisis moralitas. Menurut Magnis-Suseno, F. (1994). *Etika Politik* fenomena seperti politik uang, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan polarisasi sosial menjadi tantangan nyata bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, Pancasila sebagai etika politik hadir untuk mengingatkan kembali makna sejati kekuasaan, yakni bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk memperkaya diri atau kelompok, tetapi amanah yang harus dijalankan demi kepentingan rakyat dan kemanusiaan.

Sila kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, menegaskan bahwa setiap tindakan politik harus menjunjung tinggi martabat manusia dan menolak segala bentuk penindasan serta ketidakadilan. Menurut Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer* Sementara sila keempat, *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*, memberikan arah agar setiap keputusan politik dilakukan secara demokratis, dengan musyawarah dan kebijaksanaan, bukan dengan dominasi atau paksaan. Kedua sila ini menjadi pondasi utama etika politik Pancasila, yang mengedepankan keadaban, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Namun dalam praktiknya, penerapan etika politik Pancasila tidak selalu berjalan mulus. Munculnya politik identitas, penyebaran disinformasi di media sosial, serta meningkatnya pragmatisme politik menyebabkan pergeseran nilai dari politik yang bermoral menjadi politik yang transaksional. Menurut Suryadinata, L. (2018). *Politik Identitas di Indonesia* nilai keadilan, kemanusiaan, dan integritas kerap dikorbankan demi kepentingan kekuasaan jangka pendek. Karena itu, dibutuhkan revitalisasi kesadaran politik berbasis nilai-nilai Pancasila, baik di kalangan elit politik maupun masyarakat luas, agar moralitas dan tanggung jawab publik kembali menjadi roh dalam praktik demokrasi Indonesia.

Etika politik Pancasila juga menegaskan perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Menurut Kaelan. (2016, 2017). *Pendidikan Pancasila* dalam sistem demokrasi Pancasila, kebebasan politik diakui sebagai hak fundamental, namun harus dijalankan dengan tanggung jawab sosial. Kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam politik tidak boleh menimbulkan perpecahan, ujaran kebencian, atau merusak tatanan sosial. Sila ketiga, *Persatuan Indonesia*, menjadi dasar penting untuk membangun politik yang inklusif, menghargai perbedaan, dan berorientasi pada

kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan.

Selain itu, etika politik Pancasila menuntut integritas moral dari setiap pemimpin dan penyelenggara negara. Menurut Moerdiono. (1999). *Etika Kehidupan Berbangsa* pemimpin yang beretika Pancasila harus menjadikan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sebagai asas dalam menjalankan amanah rakyat. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan harus menjadi cerminan nyata dalam setiap tindakan politik. Pemimpin yang berpegang pada etika politik Pancasila akan menempatkan amanah rakyat sebagai prioritas tertinggi dan menghindari perilaku menyimpang seperti nepotisme, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pandangan ini, politik bukan sekadar alat untuk meraih kekuasaan, melainkan sarana luhur untuk mewujudkan kesejahteraan bersama serta menjaga martabat bangsa.

Dalam konteks globalisasi, ketika arus ideologi dan kepentingan asing semakin kuat, Pancasila memainkan peran penting sebagai benteng moral dan ideologis bangsa. Menurut Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila* Pancasila adalah “rumah bersama” yang menjadi identitas sekaligus filter budaya bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai universal

yang terkandung di dalamnya mampu menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk berinteraksi dengan dunia luar tanpa kehilangan jati diri. Melalui etika politik yang berlandaskan Pancasila, Indonesia dapat tampil sebagai negara yang demokratis, beradab, dan berkeadilan sosial sekaligus menjadi teladan bagi bangsa lain dalam menjalankan politik yang bermoral dan berperikemanusiaan.

Dengan demikian, Pancasila sebagai etika politik di era modern bukan hanya berfungsi menjaga moralitas dalam kehidupan politik, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter bangsa. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020). *Moderasi Berpancasila dalam Pendidikan* pendidikan politik berbasis Pancasila harus ditanamkan sejak perguruan tinggi agar generasi muda memahami politik sebagai pengabdian moral, bukan perebutan kekuasaan. Penguatan pendidikan politik berbasis nilai-nilai Pancasila perlu terus ditanamkan, terutama kepada generasi muda, agar mereka memahami bahwa politik sejati bukanlah soal perebutan kekuasaan, melainkan panggilan moral untuk mengabdikan kepada kepentingan rakyat. Etika politik Pancasila pada akhirnya menjadi jalan tengah yang harmonis antara kemajuan modern dan nilai-nilai kemanusiaan yang

berakar kuat pada budaya bangsa Indonesia.

### **Studi Kasus.**

Globalisasi membawa kemajuan besar dalam bidang teknologi, informasi, dan ekonomi, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Pengaruh budaya konsumerisme, individualisme, dan hedonisme dari dunia barat semakin kuat, sehingga banyak remaja yang lebih mementingkan gaya hidup materialistis, melupakan nilai gotong royong, serta mengalami penurunan rasa nasionalisme. Fenomena ini tampak nyata di lingkungan sekolah dan media sosial, di mana peserta didik lebih terfokus pada tren, popularitas, dan gaya hidup dibanding prestasi serta tanggung jawab sosial. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki peran penting sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila memberikan arah untuk menyeimbangkan kemajuan global dengan kepribadian bangsa.

### **KESIMPULAN**

Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi yang semakin kompleks. Nilai-nilai dasarnya Ketuhanan,

Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menjadi pedoman hidup yang menyatukan seluruh dimensi kehidupan bangsa, baik dalam bidang moral, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Menurut Kaelan (2017). *Filsafat Pancasila Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang memandu bangsa dalam memahami realitas dan bertindak secara bermoral*. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menunjukkan kelenturan filosofis yang memungkinkan bangsa Indonesia untuk terus beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai luhur yang membentuk jati dirinya.

Dalam konteks globalisasi, Pancasila berperan sebagai benteng ideologis yang melindungi bangsa dari berbagai pengaruh negatif seperti liberalisme ekstrem, individualisme, materialisme, dan krisis moral yang dapat mengikis identitas nasional. Menurut Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai filter ideologis yang menjaga bangsa agar tetap berakar pada kepribadiannya di tengah derasnya arus global*. Melalui pengamalan nilai-nilainya, Pancasila menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian budaya, antara kebebasan individu dan tanggung jawab

sosial, serta antara keterbukaan terhadap dunia dan keteguhan terhadap kepribadian bangsa.

Sebagai penguat karakter bangsa, Pancasila menjadi fondasi dalam membentuk generasi muda yang berintegritas, beretika, dan berjiwa nasionalis. Menurut *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Penguatan Pendidikan Karakter: pendidikan karakter berbasis Pancasila merupakan strategi utama membangun moralitas, empati, dan rasa persatuan di kalangan generasi muda. Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila perlu terus dikembangkan sebagai strategi membangun kesadaran moral, rasa kemanusiaan, dan semangat persatuan di tengah arus modernisasi yang kian deras.*

Lebih dari itu, Pancasila juga memiliki peran vital dalam menangkal radikalisme dan intoleransi. Melalui peneguhan nilai kemanusiaan yang beradab, penghormatan terhadap keberagaman, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila mampu menjadi panduan moral dalam membangun masyarakat yang damai dan toleran. Menurut Azra, A. (2015). *Wawasan Kebangsaan, Multikulturalisme, dan Integrasi Nasional Pancasila merupakan fondasi kuat bagi terciptanya masyarakat inklusif, moderat, dan bebas dari ekstremisme.* Nilai-nilai universalnya bahkan

dapat menjadi model etika global yang relevan bagi dunia yang tengah mencari keseimbangan antara kemajuan dan kemanusiaan.

Dalam bidang politik, Pancasila berfungsi sebagai etika politik yang menuntun penyelenggaraan negara agar selalu berpihak kepada kepentingan rakyat dan dijalankan dengan moralitas, kejujuran, serta tanggung jawab. Menurut Magsino, F. (1994). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, etika politik Pancasila menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah moral yang harus digunakan untuk kebaikan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau individu. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral dan sistem nilai dalam kehidupan politik, Indonesia dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, serta berkeadaban.

Pada akhirnya, Pancasila bukan sekadar warisan ideologis masa lalu, tetapi filsafat hidup yang dinamis dan relevan sepanjang zaman. Revitalisasi nilai-nilainya melalui pendidikan, kebijakan publik, serta kehidupan sosial merupakan keharusan untuk memperkuat ketahanan ideologis bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Menurut Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*; Pancasila memiliki kedudukan fundamental sebagai dasar filsafat yang harus

terus diaktualisasikan agar bangsa tidak kehilangan arah nilai. Jika nilai-nilai Pancasila terus dihayati dan diamalkan secara konsisten oleh seluruh elemen bangsa, maka Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang maju, modern, dan berdaya saing global, tanpa kehilangan jati diri dan kepribadiannya sebagai bangsa yang berketuhanan, berperikemanusiaan, dan berkeadilan sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Zahra, A. L. U, et al. *Internalisasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran Ppkn Disekolah*. vol. 9, no. 5, 2025, pp. 252–56.
- Situs, Peta, et al. *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan*. vol. 02, no. April, 1945, pp. 7–12.
- Susilawati, Eni, et al. “Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran Melalui Penerapan Profil Pelajar Pancasila Berbantuan Platform Merdeka Mengajar.” *Jurnal Teknodik*, vol. 25, 2021, pp. 155–67, <https://doi.org/10.32550/teknodik.v25i2.897>.
- Mardin, La Ode, and Khamim Zarkasih Putro. “Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran PKN Untuk Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar.” *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, vol. 17, no. 1, 2025, pp. 35–47, <https://ejournal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah>.
- Antonio, Bryan, et al. “Peran Masyarakat Sosial Yang Berpancasila Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Di Era Globalisasi.” *Jurnal Eksplorasi Pendidikan*, vol. 7, no. 3, 2024, pp. 44–52.
- Kusuma Ningrat, Hadi. “Etika Keilmuan Dan Tanggung Jawab Sosial Ilmuwan (Sebuah Kajian Aksiologis).” *Biota*, vol. 8, no. 1, 2016, pp. 100–01.
- Pembelajaran, Jurnal Inovasi. *RUNGKAT: Ruang Kata DALAM ILMU PENGETAHUAN*. vol. 2, no. 2, 2025, pp. 1–7.
- Sastrani, I Dewa Ayu Nyoman Utari. “Pancasila Ditengah Pragmatisme Politik Di Indonesia Pada Era Demokrasi.” *J-MACE Jurnal Penelitian*, vol. 5, no. 1, 2025, pp. 15–28, <https://doi.org/10.34124/jmace.v5i1.69>.
- Suwardhani, Achmad Dheni, et al. “Manajemen Pendidikan Berbasis Teknologi.” *Indonesian Research Journal on Education*, vol. 5, no. 4, 2025, <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3258>.
- Nabila, Liliana, et al. “Pancasila Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.” *Jurnal Edukasi Terkini*, vol. 1, no. 2, 2024, pp. 15–22, <https://doi.org/10.70310/zz7spj96>.
- Utama, A S, et al. “Sistem Politik Berkeadilan Pancasila: Upaya Nyata Peningkatan Ketahanan Hukum Nasional.” *Jurnal Kolaboratif ...*, vol. 7, no. 7, 2024, pp. 2500–09, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5781>.
- Wijayanto, Fahmi Nur, et al. “Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Kebijakan Pemerintah.” *Creative Commons Attribution 4.0 International License*, vol. 2, no. 3, 2023, pp. 197–207.
- Putera, Prakoso Bhairawa, and Muhammad Zulhamdani. “Pembangunan Masyarakat Melalui Penegakan Keadilan Sosial Terhadap Akses Ilmu Pengetahuan Menuju Knowledge Society.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, vol. 15, no. 2, 2020, pp.

- 191–202,  
<https://doi.org/10.47441/jkp.v15i2.129>.
- Budi Ramdani, Rahma Putri Andini, Salsabila Nur Anisa, Prihantini. “Cendikia Pendidikan.” *Cendekia Pendidikan*, vol. 4, no. 4, 2024, pp. 50–54,  
<https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.252>.
- Nuraeni, Irawati, and Dinie Anggraeni Dewi. “Peranan Pancasila Sebagai Landasan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.” *Universitas Pendidikan Indonesia*, vol. 6, 2022, pp. 9986–91.
- Azmi, Faisal, et al. “Peranan Pancasila Dalam Mendukung Berkembangnya Iptek Untuk Kini Dan Masa Akan Datang(Studi Kasus Di Desa Bah Biak Kecamatan Sidamanik Kabupaten).” *Januari*, vol. 3, 2025, pp. 1063–66.
- Ramdhani, Desi Nursyifa, and Dinie Anggaraeni Dewi. “Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi.” *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, 2022, pp. 1081–88,  
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2676>.
- Pasaribu, Riris Nauli dan Tuti atika. *Journal of Social, Justice and Policy* 34. vol. 1, no. 1, 2022, pp. 34–41.
- Fadhilah, Jihan, and Usiono Usiono. “BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika Peran Pancasila Dalam Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Usiono Usiono.” *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhineka Tunggal Ika*, vol. 2, no. 1, 2024, pp. 155–61,  
<https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.523>.
- Khusna*, 2024. vol. 3, no. 4, 2024, pp. 5126–31.
- Suyono, 2024. “PERANAN PANCASILA DALAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI ERA GLOBALISASI MAHASISWA ANGKATAN 2023 PRODI PPKn UNIPA SURABAYA.” *Holistik Analisis Nexus*, vol. 1, no. 7, 2024, pp. 109–14,  
<https://doi.org/10.62504/nexus751>.
- Yoakim Telaumbanua, Louders, et al. *Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dalam Kehidupan Mahasiswa*. vol. 7, no. 4, 2023, pp. 30–34.
- Wahyudi, and Mardani. “Tantangan Dan Peluang Demokrasi Pancasila Di Era Digital.” *Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, vol. 5, no. 2, 2024, pp. 151–65.
- Keiko Aleeza, Daanya, et al. *Pancasila Dan Inovasi Sosial Yang Menciptakan Solusi Untuk Permasalahan Masyarakat*.
- Wahyudi, and Mardani. “Tantangan Dan Peluang Demokrasi Pancasila Di Era Digital.” *Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, vol. 5, no. 2, 2024, pp. 151–65.
- Wijayanti, A A, et al. “Peran Pancasila Di Era Globalisasi Pada Generasi Z.” *Jurnal Ekonomi, Sosial ...*, vol. 4, no. 01, 2022, pp. 29–35,  
<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/842%0Ahttps://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/842/633>.
- Raihanah Muttmainnah, et al. “Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.” *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, vol. 2, no. 3, 2024, pp. 63–75,  
<https://doi.org/10.59581/garuda.v2i3.3732>.
- Nada, Sahma, et al. *PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI*. vol. 6, no. 1, 2022, pp. 1390–95.
- Nurrunnisa, Fitri, et al. “Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.” *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, no. 1145010073, 2019, pp. 23–48.
- Agus, A Aco. “RELEVANSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA DI

- ERA REFORMASI A. Aco Agus Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.” *Jurnal Office*, vol. 2, no. 2, 2016, pp. 230–34, <http://ojs.unm.ac.id/jo/article/download/2958/1608>.
- Nada, Sahma, et al. *PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI*. vol. 6, no. 1, 2022, pp. 1390–95.
- Regina Titan Puri<sup>1</sup>, Achmad Akmaluddin<sup>2</sup>. “PANCASILA DAN TANTANGAN GLOBALISASI Regina Titan Puri 1 , Achmad Akmaluddin 2.” *PT. Sriwijaya Media Permat*, vol. 1, no. 1, 2025, pp. 1–12.
- Nurkhalisa, Melia, and Dinie Anggeraeni Dewi. “Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa Di Tegah Era Globalisasi.” *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, 2022, pp. 954–59.
- Susilawati, Marietta D., et al. “Pancasila as Philosophical Basis in Strengthening National Character in the Era of Globalization.” *West Science Law and Human Rights*, vol. 3, no. 01, 2025, pp. 19–31, <https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i01.1648>.
- Subroto, Waspodo Tjipto. “International Journal of Economics and Financial Issues Revitalization of Pancasila Economic System in the Globalization Era.” *International Journal of Economics and Financial Issues*, vol. 5, no. 4, 2015, pp. 860–67, <http://www.econjournals.com>.
- Subroto, Waspodo Tjipto. “International Journal of Economics and Financial Issues Revitalization of Pancasila Economic System in the Globalization Era.” *International Journal of Economics and Financial Issues*, vol. 5, no. 4, 2015, pp. 860–67, <http://www.econjournals.com>.
- Kennedy, Alexander, and Franciscus Xaverius Wartoyo. “Harmonizing Diversity: Pancasila’s Role as The Cornerstone of Multi-Cultural Harmony As Legal Discours.” *Global International Journal of Innovative Research*, vol. 2, no. 4, 2024, pp. 747–59, <https://doi.org/10.59613/global.v2i4.137>.
- Firdaus, Aras, et al. “Pancasila Ideology in Challenges of Globalization on Mineral and Coal Law in Indonesia.” *Journal of Law and Sustainable Development*, vol. 11, no. 11, 2023, p. e1148, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1148>. “Pancasila as Philosophical Basis in Strengthening National Character in the Era of Globalization.”
- Atar, Ardian, et al. “Tantangan Dan Relevansi Pancasila Bagi Generasi Milenial Dan Z.” *Intelektiva*, vol. 4, no. 4, 2022, pp. 1–5.